BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Digitalisasi transaksi keuangan telah menjadi tren global yang mendorong efisiensi dan aksesibilitas dalam kegiatan ekonomi, terutama di era pandemi COVID-19 yang mempercepat adopsi teknologi digital. Transformasi digital dalam sistem pembayaran tidak hanya mengubah cara konsumen bertransaksi, tetapi juga membuka peluang baru bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Menurut proyeksi (Pavan Warade, 2025), nilai total transaksi pembayaran digital global mencapai US$11,53 triliun pada tahun 2024 dan diperkirakan akan mencapai US$16,59 triliun pada tahun 2028. Tren ini mencerminkan pergeseran fundamental dalam perilaku konsumen global yang semakin mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam bertransaksi (Kosim, K. P., & Legowo, 2021). Percepatan digitalisasi ini juga didorong oleh meningkatnya penetrasi smartphone dan akses internet di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perubahan perilaku konsumen ini menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk beradaptasi dengan ekosistem ekonomi digital.

Di Indonesia, *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai sistem pembayaran digital terintegrasi yang dikelola oleh Bank Indonesia sejak 2019 telah menjadi instrumen penting untuk memfasilitasi transaksi non-tunai. QRIS dirancang untuk mengatasi fragmentasi sistem pembayaran digital di Indonesia dengan menyatukan berbagai platform pembayaran dalam satu standar kode QR yang terintegrasi. Sistem ini memungkinkan penggunaan satu kode QR untuk berbagai metode pembayaran, seperti transfer bank, *e- wallet,* dan kartu debit/kredit, sehingga mengurangi kompleksitas dan biaya transaksi bagi merchant (Bank Indonesia, 2023). Keunggulan ini menjadikan QRIS sebagai solusi praktis bagi pelaku usaha kecil yang sebelumnya kesulitan mengadopsi *multiple payment gateway* dengan biaya yang mahal. Integrasi sistem pembayaran melalui QRIS juga mempermudah konsumen yang tidak perlu lagi menginstal berbagai aplikasi pembayaran untuk bertransaksi di berbagai *merchant.* Standardisasi ini menjadi langkah strategis Bank Indonesia dalam mempercepat inklusi keuangan digital di Indonesia.

Perkembangan QRIS di Indonesia menunjukkan tren adopsi yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, mengindikasikan penerimaan yang luas dari

masyarakat dan pelaku usaha. Data dari Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) mencatat bahwa transaksi QRIS meningkat dari hanya 124 juta transaksi dengan nilai Rp8,2 triliun pada tahun 2020 menjadi 6,24 miliar transaksi dengan nilai Rp695,9 triliun pada tahun 2024 (Nofie Iman, 2025). Lonjakan transaksi ini menunjukkan akseptasi yang tinggi dari masyarakat Indonesia terhadap sistem pembayaran berbasis *QR code* sebagai alternatif pembayaran tunai. Pada pertengahan tahun 2025, jumlah pengguna QRIS telah mencapai lebih dari 57 juta pengguna dan 32 juta merchant, dengan pertumbuhan transaksi mencapai 148,5% *year-on-year* pada kuartal kedua 2025 (PS Engage, 2025). Angka pertumbuhan ini mengindikasikan momentum positif yang berkelanjutan dalam adopsi pembayaran digital di Indonesia, bahkan setelah periode pandemi berakhir. Pertumbuhan eksponensial ini juga didorong oleh berbagai insentif dan kampanye literasi digital yang dilakukan oleh pemerintah dan perbankan untuk mendorong adopsi QRIS di berbagai segmen masyarakat.

(Bank Indonesia, 2023) mencatat bahwa pada Juli 2023, dari 38,24 juta pengguna QRIS, sebanyak 72% atau 27,51 juta adalah *merchant*, dengan mayoritas merupakan pelaku UMKM. Data ini mengonfirmasi bahwa QRIS telah menjadi instrumen pembayaran utama bagi sektor usaha mikro dan kecil di Indonesia, yang sebelumnya sulit mengakses infrastruktur pembayaran digital formal. Dominasi *merchant* UMKM dalam ekosistem QRIS menunjukkan bahwa sistem ini berhasil menjangkau segmen usaha kecil yang selama ini terpinggirkan dari sistem pembayaran digital konvensional. Aksesibilitas QRIS yang tinggi, dengan biaya implementasi yang rendah dan proses pendaftaran yang sederhana, menjadi faktor kunci keberhasilan penetrasi di segmen UMKM. Keberhasilan ini juga didukung oleh kebijakan Bank Indonesia yang memberikan insentif biaya transaksi yang kompetitif untuk *merchant* UMKM. Dengan demikian, QRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai instrumen inklusi keuangan yang demokratis bagi pelaku usaha kecil di Indonesia.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia dengan kontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja (Kementrian Koperasi dan UKM, 2022). Peran strategis UMKM dalam perekonomian nasional menjadikan upaya peningkatan daya saing dan efisiensi operasional mereka sebagai prioritas penting dalam kebijakan ekonomi Indonesia, sebagaimana ditegaskan oleh (Bank

Indonesia, 2023) bahwa UMKM berkontribusi signifikan dalam stabilitas ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja yang luas.

UMKM juga berperan vital dalam menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata dan mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah, seperti yang dijelaskan dalam laporan (Pavan Warade, 2025) bahwa sektor ini mendukung inklusi sosial di tengah pertumbuhan ekonomi global. Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompetitif, transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak bagi UMKM untuk tetap relevan dan berdaya saing, dengan adopsi teknologi digital, termasuk sistem pembayaran QRIS, diharapkan dapat menjadi katalis bagi peningkatan produktivitas dan profitabilitas UMKM secara signifikan (Kosim, K. P., & Legowo, 2021). Namun, tantangan dalam digitalisasi UMKM masih cukup kompleks, mulai dari keterbatasan literasi digital hingga akses infrastruktur teknologi yang tidak merata di berbagai wilayah Indonesia, sebagaimana diidentifikasi oleh (Arimurti, 2025) dalam analisis tren ekonomi digital nasional.

Adopsi QRIS pada UMKM diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas melalui berbagai mekanisme yang saling terkait dan memperkuat kinerja usaha. Penelitian oleh (Nugroho, 2021) menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran dapat meningkatkan efisiensi hingga 20 sampai dengan 30% pada UMKM melalui pengurangan waktu transaksi, minimalisasi kesalahan pencatatan, dan kemudahan rekonsiliasi keuangan. Efisiensi ini berdampak langsung pada pengurangan biaya operasional dan peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam mengelola transaksi harian. Lebih lanjut, data (Bank Indonesia, 2024) mengindikasikan bahwa UMKM yang telah mengadopsi teknologi digital berhasil meningkatkan penjualan hingga 30% melalui platform *e-commerce* dan media sosial. Peningkatan ini tidak hanya berasal dari ekspansi pasar, tetapi juga dari kemudahan transaksi yang meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Sistem pembayaran digital juga memungkinkan UMKM untuk membangun database pelanggan dan menganalisis pola pembelian untuk strategi pemasaran yang lebih efektif.

Namun, adopsi teknologi digital pada UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan signifikan yang menghambat transformasi digital secara menyeluruh. Menurut data (Kementrian Koperasi dan UKM, 2024), sekitar 35% UMKM di Indonesia belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal dalam

operasional bisnis mereka, dengan 40% UMKM masih belum memiliki akses memadai terhadap pelatihan dan pengetahuan digital. Tantangan utama meliputi literasi digital yang rendah, keterbatasan infrastruktur internet terutama di daerah terpencil, kekhawatiran terhadap keamanan siber, serta keterbatasan modal untuk investasi teknologi (Arimurti, 2025). Hambatan-hambatan ini menciptakan kesenjangan digital yang signifikan antara UMKM perkotaan dan UMKM di wilayah terpencil atau pesisir. Keterbatasan pemahaman tentang manfaat teknologi digital juga menyebabkan banyak pelaku UMKM masih ragu untuk beralih dari sistem transaksi konvensional. Kompleksitas regulasi dan prosedur administrasi yang kadang tidak ramah pengguna juga menjadi penghambat adopsi teknologi digital di kalangan UMKM tradisional.

Laporan (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2024) menunjukkan bahwa meskipun penetrasi internet nasional mencapai 82,6%, masih terdapat kesenjangan akses yang signifikan di luar Pulau Jawa, yang justru menjadi lokasi operasional banyak UMKM. Kesenjangan infrastruktur ini berdampak langsung pada kemampuan UMKM di wilayah tersebut untuk mengadopsi teknologi pembayaran digital seperti QRIS. Kualitas koneksi internet yang tidak stabil di daerah terpencil juga menimbulkan keraguan pelaku usaha untuk sepenuhnya bergantung pada sistem pembayaran digital. Perbedaan kecepatan internet antara wilayah perkotaan dan pedesaan mencapai lebih dari 50%, yang secara signifikan mempengaruhi pengalaman transaksi digital. Keterbatasan infrastruktur ini juga berdampak pada biaya akses internet yang relatif lebih mahal di daerah non-urban, menambah beban operasional UMKM. Upaya pemerintah untuk memperluas infrastruktur digital melalui program Palapa Ring dan berbagai inisiatif lainnya masih memerlukan waktu untuk mencapai pemerataan akses yang ideal di seluruh wilayah Indonesia.

UMKM di wilayah pesisir menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan UMKM perkotaan, menciptakan lapisan kesulitan tambahan dalam transformasi digital, sebagaimana diidentifikasi oleh (Arimurti, 2025) bahwa akses infrastruktur teknologi yang tidak merata di berbagai wilayah Indonesia menjadi hambatan utama. Tantangan tersebut termasuk akses terbatas ke layanan perbankan tradisional karena minimnya kantor cabang bank di wilayah pesisir terpencil, yang diperburuk oleh fluktuasi pendapatan musiman akibat ketergantungan pada sektor primer seperti perikanan dan pertanian yang sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca dan

musim panen (Bank Indonesia, 2024). Biaya transaksi yang tinggi akibat ketergantungan pada uang tunai dan jarak yang jauh ke lembaga keuangan formal menambah beban operasional UMKM pesisir, seperti yang dilaporkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2024) bahwa penetrasi internet nasional mencapai 82,6%, namun masih terdapat kesenjangan akses yang signifikan di luar Pulau Jawa. Infrastruktur digital yang tidak merata, dengan koneksi internet yang sering terputus atau kecepatan yang sangat lambat, menjadi kendala teknis utama, sementara karakteristik ekonomi maritim dengan pola pendapatan yang tidak stabil memerlukan solusi pembayaran yang fleksibel dan efisien yang dapat mengakomodasi volatilitas pendapatan (Kosim, K. P., & Legowo, 2021). Isolasi geografis juga menyebabkan akses terhadap pelatihan dan pendampingan digitalisasi usaha menjadi sangat terbatas bagi pelaku UMKM pesisir, sebagaimana ditegaskan oleh (Kementrian Koperasi dan UKM, 2024) bahwa 35% UMKM di Indonesia belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal.

Penggunaan QRIS dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi UMKM pesisir dengan menyediakan solusi pembayaran yang terintegrasi dan efisien. QRIS menyederhanakan proses pembayaran dengan menghilangkan kebutuhan untuk mengelola uang tunai fisik yang berisiko hilang atau dicuri, terutama dalam transaksi dengan nilai besar. Sistem pembayaran digital mengurangi risiko kehilangan uang tunai dan meminimalkan biaya keamanan yang harus dikeluarkan untuk pengamanan uang fisik. QRIS menciptakan rekam jejak transaksi digital yang sistematis dan otomatis, yang memudahkan UMKM pesisir dalam mengakses pembiayaan formal dari bank atau lembaga keuangan. Rekam jejak ini menjadi bukti kredibilitas usaha yang selama ini sulit didapatkan oleh UMKM informal (Sari, D. P., & Putra, 2021). QRIS juga memperluas jangkauan pelanggan melalui integrasi dengan platform digital dan *marketplace online*, memungkinkan UMKM pesisir untuk menjangkau pasar yang lebih luas di luar wilayah geografis mereka. Kemudahan pembayaran digital juga meningkatkan kepercayaan pelanggan, terutama wisatawan atau pembeli dari luar daerah yang lebih terbiasa dengan transaksi non-tunai.

Wilayah Pesisir Tasik agung di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, merupakan daerah dengan potensi UMKM tinggi, terutama di sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata pesisir yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat lokal. Sebagai wilayah pesisir yang memiliki karakteristik ekonomi berbasis sektor primer

dan pariwisata, Tasik agung menghadapi tantangan khas yang berbeda dengan UMKM perkotaan. Tantangan tersebut termasuk keterbatasan akses perbankan formal dengan hanya sedikit kantor cabang bank yang beroperasi di wilayah tersebut. Ketergantungan tinggi pada transaksi tunai menciptakan risiko keamanan dan kesulitan dalam pencatatan keuangan yang sistematis. Infrastruktur digital yang belum merata, dengan koneksi internet yang belum menjangkau seluruh wilayah secara optimal, menjadi kendala teknis dalam adopsi teknologi digital. Kondisi geografis wilayah pesisir dengan akses jalan yang kadang sulit dilalui terutama saat musim hujan juga mempengaruhi distribusi dan akses terhadap layanan keuangan formal.

Data dari (Sari, D. P., & Putra, 2021) menunjukkan bahwa hanya sekitar 40% UMKM di wilayah Tasik agung yang telah mengadopsi pembayaran digital, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 65% pada tahun yang sama. Kondisi ini mengindikasikan masih banyak UMKM yang bergantung pada transaksi tunai yang kurang efisien dan rentan terhadap kehilangan. Ketergantungan pada uang tunai juga menyebabkan UMKM tidak memiliki rekam jejak transaksi yang diperlukan untuk mengakses pembiayaan formal dari perbankan, sebagaimana dijelaskan oleh (Sari, D. P., & Putra, 2021) bahwa rekam jejak transaksi digital menjadi bukti kredibilitas usaha yang selama ini sulit didapatkan oleh UMKM informal. Rendahnya tingkat adopsi ini juga mencerminkan tantangan literasi digital dan ketersediaan infrastruktur pendukung yang masih perlu ditingkatkan, seperti yang dilaporkan oleh (Kementrian Koperasi dan UKM, 2024) bahwa 35% UMKM di Indonesia belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal dalam operasional bisnis mereka. Keterbatasan akses terhadap program pelatihan dan sosialisasi manfaat pembayaran digital menjadi salah satu faktor utama lambatnya adopsi teknologi, dengan gap antara tingkat adopsi lokal dan nasional ini menunjukkan perlunya intervensi khusus dan pendampingan intensif untuk mempercepat transformasi digital UMKM di wilayah pesisir Tasikagung (Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang, 2024).

Studi terkait penggunaan QRIS pada UMKM telah dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia dengan fokus dan metodologi yang beragam, memberikan fondasi pengetahuan yang penting namun masih memiliki gap tertentu. Penelitian oleh (Widodo, S., & Sari, 2023) di *International Journal of Economics and Finance* menemukan bahwa adopsi QRIS berkorelasi positif dengan peningkatan pendapatan UMKM di daerah pesisir Jawa Timur. Fokus penelitian tersebut adalah pada UMKM

di wilayah pesisir yang memiliki infrastruktur digital relatif lebih baik dibandingkan daerah pesisir lainnya. Metodologi yang digunakan lebih menekankan pada analisis korelasi antara adopsi QRIS dan pendapatan tanpa mendalami mekanisme efisiensi operasional yang spesifik. Temuan penelitian ini memberikan indikasi positif namun belum menjelaskan secara detail bagaimana QRIS berkontribusi terhadap peningkatan kinerja finansial UMKM. Wilayah Jawa Timur dengan karakteristik ekonomi dan infrastruktur yang berbeda dengan wilayah pesisir lainnya juga membatasi generalisasi temuan ke wilayah dengan kondisi yang berbeda.

(Sari, D. P., & Putra, 2021) dalam studi kasus di Bali yang dipublikasikan di *International Journal of Business and Management* menekankan pentingnya adopsi QRIS dalam UMKM untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kemudahan akses modal melalui rekam jejak transaksi digital. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana QRIS memfasilitasi akses pembiayaan formal bagi UMKM yang sebelumnya kesulitan mendapatkan kredit bank. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada UMKM pariwisata yang memiliki karakteristik pendapatan relatif stabil dan tingkat literasi digital yang lebih tinggi dibandingkan UMKM berbasis sektor primer. Karakteristik pelanggan wisatawan yang sudah terbiasa dengan pembayaran digital juga membuat adopsi QRIS di sektor pariwisata Bali relatif lebih mudah dan cepat. Konteks Bali sebagai destinasi wisata internasional dengan infrastruktur digital yang maju menciptakan kondisi yang berbeda dengan wilayah pesisir non-wisata. Keterbatasan ini membuat temuan penelitian kurang aplikabel untuk UMKM pesisir dengan karakteristik pendapatan musiman dan basis pelanggan lokal yang dominan.

(Nurhapsari, R., & Sholihah, 2022) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi minat adopsi QRIS di pasar tradisional Semarang dengan menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM), yang dipublikasikan di *Jurnal Ekonomi Modernisasi*. Penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan produk, persepsi kemudahan, dan persepsi manfaat mempengaruhi minat adopsi QRIS secara signifikan di kalangan pedagang pasar tradisional. Pendekatan TAM memberikan wawasan penting tentang faktor psikologis dan kognitif yang mempengaruhi keputusan adopsi teknologi pembayaran digital. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang hambatan psikologis yang perlu diatasi dalam program sosialisasi QRIS. Namun, fokus penelitian ini adalah pada niat atau minat adopsi, bukan pada dampak aktual setelah implementasi QRIS terhadap kinerja usaha. Konteks pasar tradisional perkotaan

dengan akses infrastruktur yang baik juga berbeda dengan kondisi UMKM pesisir yang menghadapi tantangan infrastruktur digital yang lebih besar.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap literatur QRIS dan UMKM, masih terdapat gap pengetahuan yang signifikan yang perlu diisi. Gap pertama adalah belum adanya analisis komprehensif tentang dampak spesifik QRIS terhadap indikator kinerja finansial seperti margin laba dan efisiensi biaya transaksi pada UMKM pesisir dengan karakteristik pendapatan musiman. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih fokus pada korelasi pendapatan atau niat adopsi tanpa menganalisis secara detail mekanisme peningkatan profitabilitas. Gap kedua adalah minimnya penelitian yang secara khusus menganalisis UMKM berbasis sektor primer (perikanan dan pertanian) yang memiliki pola pendapatan berbeda dengan UMKM pariwisata atau perdagangan. Karakteristik pendapatan musiman dan volatilitas yang tinggi pada sektor primer memerlukan analisis khusus yang belum banyak diteliti. Gap ketiga adalah kurangnya penelitian di wilayah dengan infrastruktur digital terbatas, padahal kondisi inilah yang menjadi tantangan utama digitalisasi UMKM di Indonesia. Sebagian besar penelitian dilakukan di wilayah dengan infrastruktur relatif baik, sehingga kurang merepresentasikan tantangan UMKM di wilayah tertinggal.

Selain itu, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis kondisi di Kabupaten Rembang, terutama di wilayah pesisir Tasik agung yang memiliki karakteristik unik sebagai daerah dengan infrastruktur digital terbatas namun potensi ekonomi maritim yang tinggi. Gap pengetahuan ini penting untuk diisi mengingat setiap wilayah pesisir memiliki dinamika ekonomi dan sosial yang berbeda, yang memerlukan pendekatan dan strategi adopsi teknologi yang kontekstual dan disesuaikan dengan kondisi lokal. Karakteristik spesifik Tasik agung dengan kombinasi sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata pesisir yang belum berkembang optimal memerlukan analisis tersendiri. Pemahaman tentang bagaimana QRIS dapat berfungsi efektif dalam kondisi infrastruktur terbatas akan memberikan insight penting bagi wilayah-wilayah serupa. Penelitian kontekstual ini juga penting untuk merancang strategi implementasi dan pendampingan yang sesuai dengan realitas lokal, bukan hanya mengadopsi *best practices* dari wilayah dengan kondisi yang jauh berbeda. Keunikan tantangan dan peluang di setiap wilayah pesisir menuntut pendekatan penelitian yang spesifik dan kontekstual.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan bukti empiris tentang manfaat QRIS dalam konteks spesifik wilayah pesisir dengan keterbatasan infrastruktur dan karakteristik pendapatan musiman. Bukti empiris ini akan menjadi dasar bagi kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong inklusi keuangan digital yang lebih efektif dan tepat sasaran. Penelitian ini akan mengisi gap pengetahuan mengenai bagaimana QRIS dapat menjadi solusi bagi UMKM pesisir yang menghadapi tantangan aksesibilitas perbankan dan fluktuasi pendapatan. Temuan penelitian akan memberikan rekomendasi praktis bagi stakeholder terkait, termasuk pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga pemberdayaan UMKM dalam upaya digitalisasi UMKM di wilayah pesisir Indonesia. Rekomendasi tersebut akan mencakup strategi implementasi, program pendampingan, dan kebijakan insentif yang disesuaikan dengan kondisi dan tantangan spesifik UMKM pesisir. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori tetapi juga memberikan nilai praktis yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM pesisir.

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam literatur ekonomi digital dan pengembangan UMKM, khususnya pada wilayah pesisir dengan karakteristik unik. Kontribusi teoretis meliputi pengembangan pemahaman tentang mekanisme spesifik bagaimana teknologi pembayaran digital mempengaruhi kinerja finansial UMKM dalam kondisi keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini juga akan memperkaya literatur tentang adopsi teknologi di sektor informal dan UMKM dengan karakteristik pendapatan yang tidak stabil. Secara praktis, penelitian ini akan memberikan rekomendasi kebijakan konkret yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk mempercepat adopsi pembayaran digital di wilayah pesisir. Rekomendasi untuk perbankan dan penyedia layanan pembayaran digital akan membantu merancang produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan UMKM pesisir. Bagi lembaga pemberdayaan UMKM, temuan penelitian ini akan menjadi panduan dalam merancang program pelatihan dan pendampingan yang efektif untuk transformasi digital UMKM pesisir yang masih tertinggal dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan QRIS berpengaruh signifikan terhadap peningkatan laba UMKM di wilayah pesisir Tasikagung, Kabupaten Rembang?
2. Apakah penggunaan QRIS berpengaruh signifikan terhadap efisiensi transaksi UMKM di wilayah pesisir Tasikagung, Kabupaten Rembang?
3. Seberapa besar kontribusi penggunaan QRIS terhadap peningkatan laba dan efisiensi transaksi UMKM secara simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh QRIS terhadap peningkatan laba UMKM di wilayah pesisir Tasikagung, Kabupaten Rembang
2. Menganalisis pengaruh QRIS terhadap efisiensi transaksi UMKM di wilayah pesisir Tasikagung, Kabupaten Rembang
3. Menganalisis seberapa besar kontribusi pengaruh QRIS terhadap peningkatan laba dan efisiensi transaksi UMKM secara simultan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan ekonomi digital, khususnya terkait dampak teknologi pembayaran terhadap profitabilitas dan efisiensi UMKM. Hasil penelitian ini dapat memperkaya teori tentang digitalisasi transaksi dalam konteks ekonomi mikro.

2. Manfaat Praktis

   Memberikan rekomendasi bagi pemilik UMKM di Wilayah Pesisir Tasik agung Kota Rembang untuk mengadopsi QRIS guna meningkatkan laba dan efisiensi operasional. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam merancang program sosialisasi dan insentif untuk mendorong adopsi pembayaran digital di wilayah pesisir.